



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**



## **DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG**



**Pertanian, Maju, Mandiri, Modern**





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Rencana Kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025.

Dalam urusan pilihan pertanian Rencana Kerja ini merupakan rencana kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Singaraja, 26 Pebruari 2024

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Ir. I Made Sumiarta**  
Pembina Tk I / IV.b  
NIP. 19650215 199703 1 003





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU</b>	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	35
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	43
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
	2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN</b>	57
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	57



	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	58
	Dinas Pertanian .....	59
	3.3 Program dan Kegiatan .....	
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN</b> .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rencana Kerja 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di sektor pertanian dan sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pertanian dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah



dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala OPD, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Pertanian dalam arti luas.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian Buleleng dengan perannya yang multi fungsi. Secara proporsional sektor pertanian merupakan sektor paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Kabupaten Buleleng yang berbasis pertanian dan pariwisata serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan pedesaan, maka pembangunan pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan perekonomian Bali menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Penjabaran kebijakan pembangunan ekonomi tersebut salah satunya adalah mensinergikan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

Perkembangan proses pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng sudah dilakukan melalui berbagai program untuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis serta peningkatan kesejahteraan petani, namun masih terkendala berbagai permasalahan dan kedepannya tantangan akan semakin berat mengingat keberadaan sumber daya alam dan perkembangan global. Permasalahan yang dominan dihadapi saat ini adalah rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani atau pelaku usaha dibidang pertanian dan tingginya alih fungsi lahan pertanian. Saat ini rata-rata umur petani di Kabupaten Buleleng adalah diatas 50 tahun.



Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani atau pelaku usaha pertanian adalah persepsi bahwa usaha pertanian itu tidak menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Dan Bali yang sangat ketergantungan dengan sektor pariwisata, menjanjikan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan sektor pertanian. Inilah yang menyebabkan generasi muda saat ini lebih memilih menggeluti sektor pariwisata dibandingkan sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa berusaha tani atau menjadi pelaku usaha pertanian bisa menguntungkan secara ekonomi. Sehingga laju alih fungsi lahan bisa dikurangi dan generasi muda berminat untuk menjadi petani. Untuk itu dibutuhkan gagasan dan strategi mengelola potensi pertanian di Kabupaten Buleleng.

Upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan pertanian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, dokumen tersebut antara lain adalah Rencana Kerja. Rencana Kerja 2025 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang



diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja antar SKPD dan Kecamatan.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1(satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026 serta sebagai evaluasi dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dari urusan pertanian.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);





5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 No. 9)
14. Peraturan Bupati Buleleng No. 12. Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2023 – 2026.



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah, acuan dan sekaligus pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025:

1. Sebagai acuan Dinas Pertanian dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Terwujudnya pemahaman, kesatuan langkah, sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2025 ;
3. Terwujudnya kepastian dan kejelasan pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2025;
4. Tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah 2025 dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.



### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).





### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Pertanian**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN**

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian yang sudah disepakati.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tandatangan



kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng**

Rencana Kerja merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Dinas Pertanian mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng serta realisasi APBD.

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan pertanian maka program pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 terdiri dari 6 program, 19 kegiatan, dan 47 sub kegiatan. Sedangkan untuk membiaya kegiatan pada tahun anggaran 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng diperoleh dari alokasi Pagu anggaran belanja APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 42.394.097.543,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.272.554.004,-. Atau realisasi keuangan sebesar 92,64% dan realisasi fisik 97,96 % dari rencana. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan per program adalah sebagai berikut :



# 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - d) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - a) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor
  - c) Penyediaan Bagan Logistik Kantor
  - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pengadaan Mebel
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya





- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
    - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
      - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
    - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
      - a) Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman
      - b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
    - 3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
      - a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
  3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
    - 1) Pengembangan Prasarana Pertanian
      - a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
      - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
    - 2) Pembangunan Prasarana Pertanian
      - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
      - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
      - c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
      - d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
  4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
    - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
    - 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kab/kota
      - a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner



3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

c) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

d) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota



## REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

**Alokasi Anggaran : Rp. 22.121.849.177,-**

**Realisasi Anggaran : Rp. 21.594.266.859,- (97.62%)**

#### 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 267.100.048,-

Realisasi Anggaran : Rp. 252.360.395,- (94,48%)

Hasil : Persentase realisasi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran 94,48 %.

##### a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 141.190.048,-

Realisasi Anggaran : Rp. 130.276.917,- (92,27%)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, realisasi anggaran 92,27 %.

##### b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 125.910.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 122.083.478,- (96,96%)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran 96,96%

#### 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 20.663.152.537,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.242.985.964,- (97,97%)

Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggaran 97,97%

##### a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 20.484.785.937,-

Realisasi Anggaran : Rp. 20.067.426.192,- (97,96%)

Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran 97,96 %

##### b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran : Rp. 1.280.000,-



Realisasi Anggaran : Rp. 836.000,- (65,31%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN , realisasi anggaran  
 65,31 %.

**c) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**

Alokasi Anggaran : Rp. 24.130.064,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 22.817.476,- (94,56 %)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan  
 SKPD, realisasi anggaran 94,56 %

**d) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran**

Alokasi Anggaran : Rp. 152.956.536,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 151.906.296,- (99,31%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran,  
 realisasi anggaran 99,31 %

**3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 56.912.872,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.143.792,- (95,13%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi  
 anggaran 95,13 %

**a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Alokasi Anggaran : Rp. 56.912.872,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.143.792,- (95,13%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, realisasi  
 anggaran 95,13 %

**4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 3.917.260,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.417.000,- (61,70%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 61,70%

**a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Alokasi Anggaran : Rp. 3.917.260,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.417.000,- (61,70%)





Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 61,70%

#### 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 25.313.700,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 24.160.800,- (95,45 %)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggaran 95,45 %

##### a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 313.700  
 Realisasi Anggaran : Rp. 313.500,- (99,94 %)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, realisasi anggaran 99,94 %

##### b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Alokasi Anggaran : Rp. 25.000.000,0  
 Realisasi Anggaran : Rp. 23.847.300,- (95,39%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, realisasi anggaran 95,39%

#### 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 375.529.142,-,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 334.148.640,- (88,98%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggaran 88,98%.

##### a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 35.037.150,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 33.294.414,- (95,03%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran 95,03%.

##### b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 100.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 73.317.616,- (73,32%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran 73,32%.



**c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Alokasi Anggaran : Rp. 96.254.120  
 Realisasi Anggaran : Rp. 94.300.050,- (97,97%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran 97,97%

**d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 9.279.800,- (77,33%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi anggaran 77,33%.

**e) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Alokasi Anggaran : Rp. 70.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 69.999.975,- (100%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Fasilitas Kunjungan Tamu, realisasi anggaran 100%.

**f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Alokasi Anggaran : Rp. 62.237.872,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 53.956.785,- (86,69%)  
 Hasil : Persentase realisasi sub kegiatan  
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi anggaran 86,69%.

**7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 495.763.992,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 471.391.161,- (95,08%)  
 Hasil : Persentase realisasi kegiatan  
 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi anggaran 95,08%

**a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Alokasi Anggaran : Rp. 10.250.000,-,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 9.529.800,- 92,97%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran 100%

**b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Alokasi Anggaran : Rp. 179.351.000,-



Realisasi Anggaran : Rp. 170.411.191,- (95,02%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi anggaran 95,02%

**c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Alokasi Anggaran : Rp. 268.280.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 260.358.795,- (97,05)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi anggaran 97,05%

**d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Alokasi Anggaran : Rp. 37.882.992,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 31.091.375,- (82,07)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi anggaran 82,07%

**8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi Anggaran : Rp. 231.120.001,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 209.995.107,- (90,86)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , realisasi anggaran 90,86%

**a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Alokasi Anggaran : Rp. 95.120.001,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 76.061.232,- (79,96)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran 79,96%

**b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Alokasi Anggaran : Rp. 125.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 123.933.875,- (99,15)%  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, realisasi anggaran 99,15%



**c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung  
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Alokasi Anggaran : Rp. 11.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 10.000.000,- (90,91%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung  
 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran  
 90,91%.

**2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

**Alokasi Anggaran : Rp. 2.631.473.878,-**

**Realisasi Anggaran : Rp. 2.568.292.257,- (97,60%)**

**1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.064.275.965,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.045.185.688,- (98,21%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pengawasan  
 Penggunaan Sarana Pertanian , realisasi anggaran 98,12%

**a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai  
Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**

Alokasi Anggaran : Rp. 202.331.160,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 197.819.562,- (97,77%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan  
 Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,  
 Teknologi dan Spesifik Lokasi , realisasi anggaran 97,77%

**b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 861.944.805,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 847.366.126,- (97,63%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian , realisasi  
 anggaran 97,63%

**2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan  
Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.542.197.913,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.498.817.069,- (97,19%)





Hasil : realisasi kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, realisasi anggaran 98,32%

**a) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**

Alokasi Anggaran : Rp. 426.013.052,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 414.073.966,- (97,20%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, realisasi anggaran 97, %

**3) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Alokasi Anggaran : Rp. 25.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 24.289.500,- (97,16%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, realisasi anggaran 97,16%

**a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil**

Alokasi Anggaran : Rp. 25.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 24.289.500,- (97,16%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil, realisasi anggaran 97,16%

**3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

**Alokasi Anggaran : Rp. 935.309.238,-**  
**Realisasi Anggaran : Rp. 929.846.236,- (99,42%)**

**1) Pengembangan Prasarana Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 435.309.238,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 429.846.236,- (98,75%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, realisasi anggaran 98,75%

**a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B**

Alokasi Anggaran : Rp. 202.589.478,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 197.841.084,- (97,66%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, realisasi anggaran 97,66%

**b) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya**

Alokasi Anggaran : Rp. 232.719.760,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 232.005.152,- (99,69%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, realisasi anggaran 99,69%

**2) Pembangunan Prasarana Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 500.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 500.000,000,- (100%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, realisasi anggaran 100%

**a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**

Alokasi Anggaran : Rp. 150.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 150.000.000,- (100%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ,realisasi anggaran 100%

**b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. -  
 Realisasi Anggaran : Rp. -  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, realisasi anggaran -

**c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**

Alokasi Anggaran : Rp. 350.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 350.000.000,- (100%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, realisasi anggaran 100%

**d) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**



Alokasi Anggaran : Rp. -  
 Realisasi Anggaran : Rp. -  
 Hasil : realisasi sub kegiatan  
 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian  
 Lainnya, realisasi anggaran -

#### 4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

**Alokasi Anggaran : Rp. 735.566.080,-**  
**Realisasi Anggaran : Rp. 697.226.687,- (94,79%)**

##### 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 510.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 472.335.485,- (92,61%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 92,61%

##### a) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Alokasi Anggaran : Rp. 510.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 472.335.485,- (92,61%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, realisasi anggaran 92,61%

##### 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 169.260.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 168.628.770,- (99,63%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan atas Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 99,36%

##### a) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Alokasi Anggaran : Rp. 169.260.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 168.628.770,- (99,63%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, realisasi anggaran 99,63%



### 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alokasi Anggaran : Rp. 56.306.080,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 56.662.432,- (99,92%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, realisasi anggaran 99,92%

#### a) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Alokasi Anggaran : Rp. 54.663.280,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 54.662.432,- (99,99%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Penerapan dan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, realisasi anggaran 99,99%

#### b) Jumlah alat dan mesin peternakan

Alokasi Anggaran : Rp. 1.642.800,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.600.000,- (97,39%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, realisasi anggaran 97,39%

## 5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Alokasi Anggaran : Rp. 794.507.031,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 684.781.759,- (86,19%)

### 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran : Rp. 794.507.031,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 684.781.759,- (86,19%)  
 Hasil : realisasi kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 86,19%

#### a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Alokasi Anggaran : Rp. 211.208.400,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 208.733.505,- (98,83%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, realisasi anggaran 98,83%

**b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Alokasi Anggaran : Rp. 109.200.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 106.622.998,- (97,64%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, realisasi anggaran 97,64%

**c) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis**

Alokasi Anggaran : Rp. 420.711.669,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 316.038.300,- (75,12%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis , realisasi anggaran 75,12%

**d) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Alokasi Anggaran : Rp. 53.386.962,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 53.386.956,- (100%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, realisasi anggaran 100%

**6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

**Alokasi Anggaran : Rp. 1.847.763.600,-**  
**Realisasi Anggaran : Rp. 1.415.172.298,- (99,78%)**

**1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.847.763.600,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.415.172.298,- (99,78%)  
 Hasil : realisasi kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian, realisasi anggaran 99,78%

**a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**

Alokasi Anggaran : Rp. 1.326.279.600,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.323.302.125,- (99,78%)



Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, realisasi anggaran 99,78%

**b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**

Alokasi Anggaran : Rp. 408.607.360,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 403.644.080,- (98,79%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, realisasi anggaran 98,79%

**c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**

Alokasi Anggaran : Rp. 20.000.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 18.538.924,- (92,69%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, realisasi anggaran 92,69%

**d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota**

Alokasi Anggaran : Rp. 92.876.640,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 91.870.173,- (98,92%)  
 Hasil : realisasi sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, realisasi anggaran 98,92%

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanian s/d tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Buleleng dalam bentuk tabel 2.1 berikut.





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2023	Realisasi	%	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	48,18	59,01	132,18	223,99	66,30	73,07	79,53
2	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%)	2,85	2,97	10,91	367,74	3,08	3,19	3,30
3	Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %	3,00	3,10	10,38	334,76	3,11	3,12	3,13

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 308,73 %, dikategorikan sangat baik. Pencapaian ini diantaranya disebabkan karena terjalinnya sinergi antara sumberdaya manusia baik petani maupun petugas sebagai pelaku utama di sektor pertanian dengan sumber daya alam yang dimiliki melalui pelaksanaan kegiatan yang sudah dirinci berdasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat yang didukung dari pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran meningkatnya produksi pertanian yang maju dengan indikator kinerja berupa persentase peningkatan produksi pertanian (%) dengan target di tahun 2023 sebesar 59,01 % dan hasil pencapaian 132,18 % dengan katagori Baik Sekali, hal tersebut di peroleh dari capaian indikator bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yaitu Jumlah benih ternak straw, jumlah petugas IB yang berkompeten, Jumlah penangkar benih berkompeten, Jumlah sumber benih berkualitas, jumlah pestisida nabati, jumlah vaksin hewan (Ekor), jumlah tempat pelayanan peternakan, jumlah alat dan mesin peternakan, jumlah jalan pertanian yang memadai dan jumlah alat mesin pasca panen.

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian**

Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Terkait perubahan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dimana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buleleng melebur menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan Tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan kehutanan tidak lagi ada di Kabupaten namun ke Provinsi. Dan perubahan terakhir diatur dalam peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 tahun 2023 tanggal 6 januari 2023 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.

Sinergitas dalam pelayanan dilaksanakan bersama-sama baik dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali maupun dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali diwujudkan dalam bersama-sama mewujudkan program SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi). Sedangkan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali adalah



bersama-sama dalam penanggulangan Rabies. Untuk sinergitas dengan Kementerian Pertanian adalah adanya kegiatan APBN dengan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melalui eproposal dan Krisna DAK.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng antara lain :

- Kompetisi penggunaan lahan terutama pada lahan pertanian (alih fungsi) akan semakin meningkat, akibat pembangunan sektor non-pertanian;
- Masih lemahnya kemampuan manajerial, teknis dan penerapan teknologi tepat guna baik di tingkat aparatur maupun kelembagaan tani;
- Masih lemahnya kemampuan petani/keompok tani dalam mengakses permodalan, jejaring pasar dan sistem kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar petani;
- Dampak negatif pemanasan bumi (*global warming*) menyebabkan terjadinya dinamika iklim;
- Belum adanya standar pelayanan untuk memfasilitasi kegiatan usaha di sektor pertanian dan peternakan;
- Alih teknologi pertanian masih rendah;
- Rendahnya kualitas produk pertanian dan peternakan;
- Lemahnya kelembagaan tani;
- Sistem koordinasi antar lembaga masih lemah;
- Peranan institusi dan lembaga pemasaran masih rendah;
- Masih adanya penyakit hewan menular strategis.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

#### a. Tantangan

Dalam pelaksanaan urusan pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan
- Lahan kritis dan cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan perkembangan tanaman;
- Gangguan penyakit dari hewan ke manusia seperti rabies dan flu burung;



- Masih ditemukannya penggunaan bahan kimia yang membahayakan kesehatan antara lain, chlorine, formalin, residu pestisida pada sayuran, beras, buah-buahan, daging, susu, dan telur
- Lemahnya posisi tawar dan akses permodalan untuk membiayai usahanya
- Masih rendahnya SDM petani sehingga kemampuan dalam mengelola usahanya kurang optimal
- Masih rendahnya SDM petani dalam mengakses dan menggunakan teknologi pertanian terkini

#### b. Peluang

Adapun peluang dalam menjawab tantangan tersebut adalah:

- Kebijakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian;
- Komitmen Pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
- Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
- Kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit zoonosis tinggi.

Rumusan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditidakklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 yaitu:

1. Kondisi pertanian masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, pangan dan perkebunan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.
2. Produk hasil pertanian, pangan dan perkebunan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian baik petugas maupun petani.
4. Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha pertanian.

Selain itu terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Belum stabilnya tingkat peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura
  - Sumber Daya Manusia (SDM) petani yang belum sepenuhnya dapat mengadopsi teknologi pertanian
  - Anomali iklim yang tidak dapat diprediksi
  - Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan
2. Tingginya penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam usaha tani Hal ini dapat diatasi dengan :
  - Pengembangan penggunaan pupuk organik dalam budidaya
  - Pengembangan penggunaan pestisida organik
  - Rintisan budidaya pertanian organik

Kesadaran petani akan pentingnya penggunaan pestisida organik perlu ditingkatkan, karena residu pestisida organik akan berdampak pada kesehatan manusia dan juga lingkungan disekitarnya. Selain itu budidaya pertanian organik ini juga ditunjang oleh populasi hama dan penyakit tanaman yang juga dipengaruhi oleh iklim dan musim sebagai contoh musim penghujan dengan curah hujan intensitas yang tinggi akan berdampak pada munculnya hama dan penyakit tanaman.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pembangunan pertanian Kabupaten Buleleng sebagaimana Rancangan awal RPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2025 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam mengatasi isu strategis yang ada, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunannya.

Namun disisi lain Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian. Dari uraian tersebut, tugas Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 sangat kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada

tahun 2025 rencana anggaran yang dialokasi untuk Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebesar Rp.31.800.000.000,-.

Dilihat dari rancangan akhir RPD sebesar Rp. 31.800.000.000,- maka seluruh kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng diadopsi dalam rancangan akhir RPD ini.

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2025 harus benar dilaksanakan. Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.4

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari proposal yang disampaikan secara langsung, maupaun dalam usulan yang berasal dari Musrenbang. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Pemangku Kepentingan (stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Selain itu masih ada kegiatan Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD untuk menampung usulan-usulan dari stakeholder terkait.

Seluruh bentuk Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Buleleng Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 2.5.





### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada RPJMN 2020-2024, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Selain Kedaulatan Pangan yang ada dalam Nawa Cita, juga terdapat Peningkatan Agro industri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dan Agro industri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri. Dari kedua sub agenda kedaulatan pangan dan peningkatan agro industri, maka Kementerian Pertanian hadir dengan visi "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Tercapainya visi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana sasaran strategis yang ditetapkan lima tahun kedepan, yang meliputi 1) meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; 2) terjaminnya distribusi pangan; 3) meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; 4) meningkatnya konsumsi pangan lokal; 5) stabilnya produksi cabai dan bawang merah; 6) berkembangnya produk bernilai tambah dan berdaya saing; 7) tersedianya bahan baku bio industry dan bio energi; 8) meningkatnya kualitas sumber daya insane petani; 9) meningkatnya pendapatan keluarga petani; 10) meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian; serta 11) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.



Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun empat kebijakan yaitu (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, (3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional, serta (4) Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Pertanian di Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng dengan kebijakan nasional antara lain:

- Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha
- Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah
- Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Buleleng dari masing-masing komponen pembangunan

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting)

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian rancangan awal Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah “Peningkatan produksi mutu, daya saing dan pemasaran komoditas

pertanian” Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju  
Indikator : Persentase peningkatan produksi pertanian (%)
2. Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri  
Indikator : Persentase kelembagaan petani dan pelaku usaha yang mandiri (%)
3. Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern  
Indikator : Persentase produksi pertanian dengan teknologi(%)

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan berupa RENJA sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur pembangunan pertanian wilayah Kabupaten Buleleng
- Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Buleleng
- Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik
- Terciptanya koordinasi internal antar bidang yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mencanangkan program dan kegiatan sebagai berikut :



## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - (4) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - (1) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - (2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - (5) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (2) Pengadaan Mebel
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

### a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- (2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

### b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

- (1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- (2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

### c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

### d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- (2) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

## 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

### a. Pengembangan Prasarana Pertanian

- (1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

### b. Pembangunan Prasarana Pertanian



- (1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - (2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
  - (3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - (4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
  - (5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
  - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    - (1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
  - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - (1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
    - (2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
  - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
    - (1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
    - (2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
    - (3) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota





- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- (2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- (3) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- (4) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

## 6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

### a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- (3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- (4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dengan rincian 5 program, 8 kegiatan, dan 21 sub kegiatan adalah urusan pilihan pertanian dan 1 program, 9 kegiatan, 25 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekretariat;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 secara total sebesar Rp. 31.800.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Buleleng Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ditunjukkan oleh Tabel 3.1. Dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Strategis tahun 2023 – 2026 dapat dilihat berdasarkan table 3.2.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Buleleng. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Singaraja, 29 Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng



**Ir. I Made Sumiarta**

Pembina Tk I / IV.b

NIP. 19650215 199703 1 003

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Dinas Pertanian Kab.Buleleng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran		Awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Produksi Pertanian yang berdaya saing	Meningkatnya Produksi Pertanian yang Maju	Persentase peningkatan produksi Pertanian (%)			48.18	59.01	66.30	73.07	79.53
				Jumlah benih ternak (straw) unggul (ekor)	PKH	16,000.00	17,000	18,000	19,000	20,000
				Jumlah petugas yang berkompeten (orang)	PKH	20	25	30	35	38
				Jumlah Penangkar Benih Berkompeten (kelompok)	horti	6	7	8	9	10
					TP	7	8	9	10	11
					BUN	2	3	4	5	6
				Jumlah Sumber Benih Berkualitas (kelompok)	TP	1	1	1	1	1
					HORTI	13	14	15	16	17
					BUN	1	1	1	1	1
				Jumlah pestisida nabati (jenis)	HORTI	1	5	6	7	8
				Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis)	PKH	1,500	2,000	2,500	2,750	3,000
				(lokasi)	PKH	9	10	10	10	10
				Jumlah alat dan mesin peternakan (paket)	PKH	1	1	1	1	1
				Jumlah sumber air pertanian (paket)	PSP	3	4	5	6	7
				Jumlah jalan pertanian yang memadai (paket)	PSP	1	2	3	4	5
				Jumlah alat mesin pertanian (paket)	PSP	3	3	3	3	3
				Jumlah alat mesin pasca panen (paket)	BUN	5	8	9	10	11
					HORTI					
					TP					
	Terwujudnya Produksi Pertanian yang Mandiri	Persentase Kelembagaan Petani dan pelaku usaha yang Mandiri (%)				2.85	2.97	3.08	3.19	3.30
				Jumlah SDA Pertanian berpotensi (kelompok)	penyuluhan	5	6	7	8	9
				Jumlah Potensi wilayah (lokasi)	penyuluhan	9	9	9	9	9
				Jumlah Penyuluh bersertifikat (orang)	penyuluhan	47	48	49	50	51
				Jumlah Penyuluh swadaya (orang/kelompok)	penyuluhan	6	8	10	12	14
				Jumlah petani/Poktan/gapoktan dgn skor kemampuan Klas Madya (kelompok)	penyuluhan	70	71	72	73	74
				Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis (unit)	PKH	9	9	9	9	9
				Jumlah sarpras pertanian dan peternakan (unit)	PKH	9	9	9	9	9
				Jumlah fasilitas pendukung smartfarming (kelompok)	penyuluhan	1	2	3	4	5
				Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya (kelompok)	penyuluhan	5	6	7	8	9
				Jumlah POKTAN yang dibiayai lembaga keuangan (kelompok)	PSP	9	18	27	36	45

		Terwujudnya Produksi dan Pemasaran Pertanian yang Modern	Persentase Produksi Pertanian dengan teknologi %			3	3.10	3.11	3.12	3.13
				jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI (jenis)	TP	0	1	2	3	4
					horti	1	1	1	1	1
					bun	1	2	3	3	3
					PKH	1	1	1	1	1
				Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna (kelompok)	horti	0	1	1	1	1
					PKH	0	1	1	1	1
					bun	0	1	1	1	1
					PEYULUHAN	1	1	1	1	1
				Jumlah hasil produksi pertanian ;	jumlah Produksi	308,289.50	317,846.47	317,877.30	317,908.13	317,938.96
				Produksi padi (Ton)	TP	106,660.50	109,966.98	109,977.64	109,988.31	109,998.97
				Produksi palawija (Ton)	TP	37,033.00	38,181.02	38,184.73	38,188.43	38,192.13
				Produkai Hortikultura (Ton)	HORTI	137,855.00	142,128.51	142,142.29	142,156.08	142,169.86
				Produkai Perkebunan (Ton)	BUN	19,000.00	19,589.00	19,590.90	19,592.80	19,594.70
				Produkai Daging (Ton)	PKH	7,741.00	7,980.97	7,981.75	7,982.52	7,983.29
				Populasi sapi (Ekor)		149,305	149,610	149,915	150,220	150,525
				Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara online (jenis)	TP	13	16	17	18	19
					BUN					
					HORTI					
					PKH					
				Jumlah produk pertanian yang dipasarkan secara offline (jenis)	TP	7	8	9	10	11
					BUN	6	7	8	9	10
					HORTI	44	45	46	47	48
					PKH	3	4	5	6	7
				Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian (mitra usaha)	TP	4	5	6	7	8
					BUN					
					HORTI					
				Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti (mitra usaha)	BUN	1	1	2	2	3
					HORTI	3	4	5	6	7
					PKH	1	1	1	1	1
		Meningkatnya tata kelola adminitrasi perkantoran	Persentase capaian fisik dan keuangan (persen)	Sekretariat	100	100	100	100	100	



**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Buleleng**

**Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah %	Kabupaten Buleleng	19.900.955.397,18			100	19.850.000.000,00
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai perundangan		26 dokumen	292.973.397,18		26 dokumen	292.973.397,18
3	27	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 dokumen	171.749.397,18		6 dokumen	171.749.397,18
					- Jumlah dokumen renstra dan renja		2 dokumen			2 dokumen	
3	27	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18 Laporan	121.224.000,00		18 dokumen	121.224.000,00
					- Jumlah dokumen evaluasi kinerja		1 dokumen			1 dokumen	
					- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan		20 kali			20 kali	
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan		135 dokumen	17.663.911.802,82		135 dokumen	17.663.911.802,82
3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		168 orang /bulan	17.430.555.603		168 orang /bulan	17.430.555.603
3	27	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13 dokumen	11.112.200		13 dokumen	11.112.200
3	27	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	40.408.000		12 kali	40.408.000
3	27	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		48 dokumen	181.836.000		48 dokumen	181.836.000
					- Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen			1 dokumen	-
					- Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran		2 dokumen			2 dokumen	-
3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset BMD		36 laporan	70.714.000,00		36 laporan	70.714.000,00
3	27	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		36 laporan	70.714.000,00		36 laporan	70.714.000,00
3	27	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah		12 dokumen	10.102.000,00		12 dokumen	10.102.000,00
3	27	01	2.04	07 Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 dokumen	10.102.000,00		12 dokumen	10.102.000,00
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		13 dokumen	373.774.000,00		13 dokumen	373.774.000,00
3	27	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	80.816.000,00		1 paket	80.816.000,00
3	27	01	2.05	04 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	292.958.000,00		12 Dokumen	292.958.000,00
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah		53 laporan	441.457.400,00		53 laporan	441.457.400,00
3	27	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 paket	25.255.000,00		5 paket	25.255.000,00
3	27	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		45 paket	101.020.000,00		45 paket	101.020.000,00
					- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang diadakan dalam kondisi baik		3 jenis	-		3 jenis	-
3	27	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	101.020.000,00		12 paket	101.020.000,00
3	27	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 dokumen	12.122.400,00		4 dokumen	12.122.400,00
3	27	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		2 laporan	101.020.000,00		2 laporan	101.020.000,00
3	27	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 laporan	101.020.000,00		50 laporan	101.020.000,00

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang Pengadaan BMD		3 unit	50.955.397,18			3 unit	50.955.397,18
3	27	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	35.802.397,18			2 unit	35.802.397,18
3	27	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 unit	15.153.000,00			2 unit	15.153.000,00
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas penunjang kegiatan Penunjang urusan pemerintah daerah		157 laporan	787.956.000,00			157 laporan	787.956.000,00
3	27	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura		12 laporan 3000 surat	73.744.600,00			12 laporan 3000 surat	73.744.600,00
3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		35 laporan	252.550.000,00			35 laporan	252.550.000,00
3	27	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 laporan	259.621.400,00			2 laporan	259.621.400,00
3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		96 laporan	202.040.000,00			96 laporan	202.040.000,00
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		53 laporan	209.111.400,00			53 laporan	209.111.400,00
3	27	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		50 unit	133.346.400,00			50 unit	133.346.400,00
3	27	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	50.510.000,00			1 unit	50.510.000,00
3	27	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	25.255.000,00			2 unit	25.255.000,00
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Sarana Pertanian yang Unggul %		48,18	5.000.000.000,00			73,30	5.000.000.000,00
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian		21 Laporan	1.352.000.000,00			35 Laporan	1.352.000.000,00
3	27	02	2.01	01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		21 Laporan	912.000.000,00			35 Laporan	912.000.000,00
					Jumlah Penangkar benih yang berkompeten		7 Kelompok				10 Kelompok	
					Jumlah Sumber benih berkualitas		1 Kelompok				1 Kelompok	
					Jumlah Pestisida nabati		1 jenis				2 jenis	
					Jumlah alat mesin pasca panen		1 jenis				3 jenis	
					jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI		0 jenis				3 jenis	
					Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan online		2 jenis produk				3 jenis produk	
					Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan offline		7 jenis produk				10 jenis produk	
					Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian		1 kali				2 kali	
					- Jumlah demplot peningkatan kualitas tanaman pangan		1 paket				1 paket	
3	27	02	2.01	02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		2 Laporan	440.000.000,00			8 Laporan	440.000.000,00
					Jumlah alat mesin prapanen		1 jenis				4 jenis	
					Jumlah Pupuk/Pestisida nabati		1 jenis				4 jenis	
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		74 Dokumen	1.824.000.000,00			96 Dokumen	1.824.000.000,00
3	27	02	2.02	02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		74 Dokumen	912.000.000,00			96 Dokumen	912.000.000,00
					Jumlah Penangkar benih yang berkompeten		6 Kelompok				9 Kelompok	
					Jumlah Sumber benih berkualitas		13 Kelompok				16 Kelompok	
					Jumlah Pestisida nabati		1 jenis				3 jenis	
					Jumlah alat mesin pasca panen		3 jenis				4 jenis	
					jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI		-				1 jenis	
					Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna		-				1 kelompok	
					Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan online		5 produk				6 produk	

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan offline		44 produk				47 produk	
						Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian		-				3 kali	
						Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti		-				4 kali	
						- Jumlah SL GAP komoditas hortikultura		2 kelompok				2 kelompok	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam		26 Dokumen	912.000.000,00			41 Dokumen	912.000.000,00
						Jumlah Penangkar benih yang berkompeten		2 Kelompok				5 Kelompok	
						Jumlah Sumber benih berkualitas		1 Kelompok				1 Kelompok	
						Jumlah Pestisida nabati		0 jenis				2 jenis	
						jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI		1 jenis				3 jenis	
						Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna		-				1 kelompok	
						Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan online		5 produk				6 produk	
						Jumlah Produk pertanian yang di pasarkan dengan offline		6 produk				9 produk	
						Jumlah pelaksanaan temu usaha pertanian		1 kali				2 kali	
						Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti		1 kali				2 kali	
						- Jumlah penanggulangan bencana komoditas perkebunan		9 kelompok				10 kelompok	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak		62 Laporan	1.824.000.000,00			78 Laporan	1.824.000.000,00
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil PKH	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		62 Laporan	1.824.000.000,00			78 Laporan	1.824.000.000,00
						Jumlah benih ternak (straw) unggul		16.000 benih ternak				19.000 benih ternak	
						Jumlah petugas IB yang berkompeten		20 orang				35 orang	
						Jumlah pengelolaan pertanian dan peternakan sesuai aspek teknis		9 unit/lokasi				9 unit/lokasi	
						Jumlah sarpras pertanian dan peternakan		9 unit				9 unit	
						Jumlah tempat pelayanan peternakan		10 unit/lokasi				10 unit/lokasi	
						Jumlah alat dan mesin peternakan		1 unit				1 unit	
						jumlah jenis produk pertanian HASIL INOVASI		1 jenis				1 jenis	
3	27					Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna		-				1 kelompok	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang menggunakan Prsarana Pertanian yang Unggul %		48,18	3.449.044.602,82			73,30	3.500.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian		41 laporan	675.000.000,00			41 laporan	675.000.000,00
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1 Dokumen	380.000.000,00			1 Dokumen	380.000.000,00
						Jumlah pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1 Paket				1 Paket	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		40 Laporan	295.000.000,00			40 Laporan	295.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian		4 Unit	2.774.044.602,82			20 Unit	2.825.000.000,00
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara		1 Unit	674.044.602,82			5 Unit	725.000.000,00
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	600.000.000,00			5 Unit	600.000.000,00
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 unit	1.000.000.000,00			5 Unit	1.000.000.000,00
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	500.000.000,00			5 Unit	500.000.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kelompok Tani / Ternak yang berbudidaya secara intensif %		48,18	1.000.000.000,00			73,30	1.000.000.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian kesehatan hewan/penyakit hewan		25 laporan	1.000.000.000,00			25 laporan	1.000.000.000,00

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		22 Laporan	615.000.000,00			2 Laporan	615.000.000,00
						Jumlah tempat pelayanan peternakan		9 tempat	-			10 tempat	-
						Jumlah obat/vaksin peternakan (dosis)		1.500 dosis	-			2.750 dosis	-
						- Jumlah penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		1 paket	-			2 paket	-
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		3 Laporan	385.000.000,00			6 Laporan	385.000.000,00
						Jumlah alat dan mesin peternakan		1 jenis	-			2 jenis	-
						Jumlah setifikat NKV		2 Unit	-			4 Unit	-
3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian %</b>		<b>100</b>	<b>550.000.000,00</b>			<b>100</b>	<b>550.000.000,00</b>
3	27	05	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</b>		<b>50 Ha</b>	<b>550.000.000,00</b>			<b>65 Ha</b>	<b>550.000.000,00</b>
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		50 Ha	135.325.000,00			65 Ha	135.325.000,00
						Jumlah MoU Produk Pertanian yang ditindaklanjuti		3 Kelompok	-			6 Kelompok	-
						- Jumlah penanggulangan bencana komoditas hortikultura		3 Kelompok	-			5 Kelompok	-
						- Jumlah SL-PHT komoditas Hortikultura		5 kelompok	-			7 kelompok	-
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		50 Ha	135.325.000,00			65 Ha	135.325.000,00
						- jumlah pelatihan kewaspadaan OPT tanaman pertanian		2 Kelompok	-			4 Kelompok	-
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		9 Laporan	135.325.000,00			10 Laporan	135.325.000,00
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		9 Laporan	144.025.000,00			10 Laporan	144.025.000,00
						- Jumlah fasilitasi pembiayaan pertanian pada kelompok tani		9 kali	-			10 kali	-
3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis %</b>		<b>50</b>	<b>1.900.000.000,00</b>			<b>70</b>	<b>1.900.000.000,00</b>
3	27	07	2.01		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Persentase kelembagaan yang melakukan intensifikasi pengelolaan pertanian dan peternakan %			<b>1.900.000.000,00</b>				<b>1.900.000.000,00</b>
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	1.437.338.529,20			1 Unit	1.437.338.529,20
						Jumlah SDA Pertanian berpotensi		5 kelompok	-			8 kelompok	-
						Jumlah Potensi wilayah		9 Lokasi	-			9 Lokasi	-
						Jumlah Penyuluh bersertifikat		47 orang	-			50 orang	-
						jumlah Penyuluh swadaya		6 kelompok	-			12 kelompok	-
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		9 Unit	316.400.000,00			9 Unit	316.400.000,00
						Jumlah petani/Poktan/gapoktan dgn skor kemampuan Klas Madya		70 kelompok	-			70 kelompok	-
						Jumlah POKTAN dengan biaya swadaya		5 kelompok	-			8 kelompok	-
						Jumlah POKTAN dengan biaya lembaga keuangan		9 kelompok	-			36 kelompok	-
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1 Unit	90.000.000,00			3 Unit	90.000.000,00
						Jumlah fasilitas pendukung smartfarming		1 kelompok	-			4 kelompok	-
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		2 Unit	56.261.470,80			2 Unit	56.261.470,80
						Jumlah penerapan hasil riset di tingkat pengguna		1 kelompok	-			1 kelompok	-
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		1 kelompok	-			2 kelompok	-
									<b>31.800.000.000,00</b>				<b>31.800.000.000,00</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif



Singaraja , 29 januari 2024  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Buleleng

**Ir. I Made Sumiarta,**  
NIP. 19650215 199703 1 003